

JURNAL

EKONOMI & BISNIS



3

KOREKSI BIAS KOEFISIEN BETA DI BURSA EFEK INDONESIA

Rowland Bismark Fernando Pasaribu

POLA ATRIBUT YANG MEMPENGARUHI PREFERENSI KONSUMEN DALAM MEMBELI RUMAH DI KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008

Asri Wening Handayani

DAMPAK KEGIATAN INVESTASI TERHADAP PENDAPATAN PER KAPITA MASYARAKAT KABUPATEN SLEMAN PASCA OTONOMI DAERAH

Rudy Badrudin

MODEL EMPIRIS PERILAKU BERWIRAUUSAHA USAHA KECIL MENENGAH DI DIY DAN JAWA TENGAH

Tony Wijaya

PERGESERAN PENYERAPAN TENAGA KERJA PASCA LUMPUR LAPINDO SIDOARJO DAN UPAYA PENYELESAIANNYA

Sri Kusreni

Didin Fatihudin

DAMPAK MANAJEMEN LABA TERHADAP RELEVANSI INFORMASI LAPORAN KEUANGAN DIMODERASI OLEH AKRUAL DISKRESIONER JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG

Astrid Rona Novianty Paluruan

Baldris Siregar



Rp7.500,-

| | | | | | |
|-----|--------|-------|------------|-----------|-------------------|
| JEB | VOL. 3 | NO. 2 | Hal 61-166 | Juli 2009 | ISSN: 1978 - 3116 |
|-----|--------|-------|------------|-----------|-------------------|

JURNAL EKONOMI & BISNIS (JEB)

EDITOR IN CHIEF

Prof. Dr. Djoko Susanto, MSA., Akuntan
STIE YKPN Yogyakarta

EDITORIAL BOARD MEMBERS

Dr. Baldic Siregar, MBA., Akuntan
STIE YKPN Yogyakarta

Dr. Soerabno, M.Ec.
Universitas Gadjah Mada

Dr. Dody Hapsoro, MSPA., MBA., Akuntan
STIE YKPN Yogyakarta

Dr. Wisnu Prajogo, SE., MBA.
STIE YKPN Yogyakarta

MANAGING EDITORS

Dra. Sinta Sudarini, MS., Akuntan
STIE YKPN Yogyakarta

EDITORIAL SECRETARY

Drs. Rudy Badrudin, M.St.
STIE YKPN Yogyakarta

PUBLISHER

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIE YKPN Yogyakarta
Jalan Seturan Yogyakarta 55281
Telpon (0274) 486160, 486321 ext. 1100 Fax. (0274) 486155

EDITORIAL ADDRESS

Jalan Seturan Yogyakarta 55281
Telpon (0274) 486160, 486321 ext. 1332 Fax. (0274) 486155
<http://www.stieykn.ac.id> • e-mail: rudy@stieykn.ac.id
Bank Mandiri atas nama STIE YKPN Yogyakarta No. Rekening 137 - 0095042814

Jurnal Ekonomi & Bisnis (JEB) terbit sejak tahun 2007. JEB merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (STIE YKPN) Yogyakarta. Penerbitan JEB dimaksudkan sebagai media penunjang karya ilmiah baik berupa kajian ilmiah maupun hasil penelitian di bidang ekonomi dan bisnis. Setiap naskah yang dikirimkan ke JEB akan ditelaah oleh MITRA BESTARI yang bidangnya sesuai. Daftar nama MITRA BESTARI akan dicantumkan pada nomor paling akhir dari setiap volume. Penulis akan menerima lima eksemplar cetak lepas (*off print*) setelah terbit.

JEB diterbitkan setahun tiga kali, yaitu pada bulan Maret, Juli, dan Nopember. Harga langganan JEB Rp7.500,- ditambah biaya kirim Rp12.500,- per eksemplar. Berlangganan minimal 1 tahun (volume) atau untuk 3 kali terbitan. Kami memberikan kemudahan bagi para pembaca dalam mengakses karya ilmiah dalam bentuk *electronic file* artikel-artikel yang dimuat pada JEB dengan cara mengakses artikel-artikel tersebut di website STIE YKPN Yogyakarta (<http://www.stieykn.ac.id>).

Vol. 3, No. 2, Juli 2009

ISSN: 1978-3116

JURNAL
EKONOMI & BISNIS

Tahun 2009

JURNAL EKONOMI & BISNIS (JEB)

EDITOR IN CHIEF

Prof. Dr. Djoko Susanto, MSA., Akuntan
STIE YKPN Yogyakarta

EDITORIAL BOARD MEMBERS

Dr. Baldris Siregar, MBA., Akuntan
STIE YKPN Yogyakarta

Dr. Soeratho, M.Ec.
Universitas Gadjah Mada

Dr. Dody Hapsoro, MSPA., MBA., Akuntan
STIE YKPN Yogyakarta

Dr. Wisnu Prajogo, SE., MBA.
STIE YKPN Yogyakarta

MANAGING EDITORS

Dra. Sinta Sudarini, MS., Akuntan
STIE YKPN Yogyakarta

EDITORIAL SECRETARY

Drs. Rudy Badrudin, M.Si.
STIE YKPN Yogyakarta

PUBLISHER

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIE YKPN Yogyakarta
Jalan Seturan Yogyakarta 5E281
Telpon (0274) 486160, 486321 ext. 1100 Fax. (0274) 486155

EDITORIAL ADDRESS

Jalan Seturan Yogyakarta 5E281
Telpon (0274) 486160, 486321 ext. 1332 Fax. (0274) 486155
<http://www.stieykpn.ac.id> • e-mail: rudy@stieykpn.ac.id
Bank Mandiri atas nama STIE YKPN Yogyakarta No. Rekening 137 - 0095042814

Jurnal Ekonomi & Bisnis (JEB) terbit sejak tahun 2007. JEB merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (STIE YKPN) Yogyakarta. Penerbitan JEB dimaksudkan sebagai media penguangan karya ilmiah baik berupa kajian ilmiah maupun hasil penelitian di bidang ekonomi dan bisnis. Setiap naskah yang dikirimkan ke JEB akan ditelaah oleh MITRA BESTARI yang bidangnya sesuai. Daftar nama MITRA BESTARI akan dicantumkan pada nomor paling akhir dari setiap volume. Penulis akan menerima lima eksemplar cetak lepas (*off print*) setelah terbit.

JEB diterbitkan setahun tiga kali, yaitu pada bulan Maret, Juli, dan Nopember. Harga langganan JEB Rp7.500,- ditambah biaya kirim Rp12.500,- per eksemplar. Bertanggungan minimal 1 tahun (volume) atau untuk 3 kali terbitan. Kami memberikan kemudahan bagi para pembaca dalam mengarsip karya ilmiah dalam bentuk *electronic file* artikel-artikel yang dimuat pada JEB dengan cara mengakses artikel-artikel tersebut di website STIE YKPN Yogyakarta (<http://www.stieykpn.ac.id>).

DAFTAR ISI

KOREKSI BIAS KOEFISIEN BETA DI BURSA EFEK INDONESIA

Rowland Bismark Fernando Pasaribu
81-89

POLA ATRIBUT YANG MEMPENGARUHI PREFERENSI KONSUMEN DALAM MEMBELI RUMAH DI KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TAHUN 2008

Asri Wening Handayani
91-105

DAMPAK KEGIATAN INVESTASI TERHADAP PENDAPATAN PER KAPITA MASYARAKAT KABUPATEN SLEMAN PASCA OTONOMI DAERAH

Rudy Badrudin
107-117

MODEL EMPIRIS PERILAKU BERWIRUSAHA USAHA KECIL MENENGAH DI DIY DAN JAWA TENGAH

Tony Wijaya
119-131

PERGESERAN PENYERAPAN TENAGA KERJA PASCALUMPUR LAPINDO SIDOARJO DAN UPAYA PENYELESAIANNYA

Sri Kusreni
Didin Fatihudin
133-143

DAMPAK MANAJEMEN LABA TERHADAP RELEVANSI INFORMASI LAPORAN KEUANGAN DIMODERASI OLEH AKRUAL DISKRESIONER JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG

Astrid Rona Novianty Paluruan
Baldric Siregar
145-166

PERGESERAN PENYERAPAN TENAGA KERJA PASCA LUMPUR LAPINDO SIDOARJO DAN UPAYA PENYELESAIANNYA

Sri Kusreni

Fakultas Ekonomi Pascasarjana Universitas Airlangga
Jalan Airlangga Nomor 4-6, Surabaya 60286
Telepon +62 31 5026288, Fax. +62 31 5026288
E-mail: enny_sk@yahoo.com

Didin Fatihudin

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya
Jalan Sutorejo Nomor 59, Surabaya
Telepon +62 31 3811966, Fax. +62 31 3813096
E-mail: dfatihudin@yahoo.co.id

ABSTRACT

Manpower or labour is production factor which natural resources, capital, and managerial skill can to large productivity capacity. Lumpur Lapindo cases in 2006 may already paralyzed economy sector activity include production activity in Sidoarjo Regency. Many land, agriculture, animal husbandry, small industry, and factory, heaped up mud. Road toll and bridge the thing wich output production and distribution also many experience obstruction. Already happen manpower or labour change in Sidoarjo Regency from sector to sector and from agriculture to industry. There are some indicates that from primary sector to secondary sector or on the contrary and from secondary sector to primary sector, from white collar worker to manufacture or farmer worker or on the contrary and form collar worker to sales product. But the problem the government Sidoarjo Regency prepare field for inhabitant the suffer from a loss well income. Work but no appropriate with expertise. Its in a natural they self activity.

Keywords: labour, lumpur lapindo, business sector, economic growth, and economic development

PENDAHULUAN

Lumpur Lapindo merupakan peristiwa yang telah mengemparkan masyarakat Indonesia bahkan telah menjadi berita dunia karena di Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo telah terjadi semburan lumpur pada tanggal 29 Mei 2006 yang mengakibatkan kerugian ekonomi dan non ekonomi yang luar biasa. Disebut Lapindo, karena tempat asal keluar lumpur tersebut adalah bekas lubang eksplorasi dan eksploitasi dari PT. Lapindo Berantas yang bergerak dalam kegiatan eksplorasi gas alam. Perusahaan ini berada di bawah kelompok usaha Bakrie Group milik Bakrie Brother di Jakarta. Jika menelusuri ke belakang pihak yang menjadi penyebab terjadinya lumpur Lapindo dan paling bertanggungjawab tentu agak sulit. Instrumen dan variabel ekonomi suatu daerah yang sudah terencana dengan baik, tersusun rapi, kadang menjadi porak poranda, apabila variabel non ekonomi di luar dugaan manusia menjadi dominan. Lumpur Lapindo adalah variabel non ekonomi.

Keluarnya lumpur sampai saat ini tidak dapat dibendung dan terus mengeluarkan lumpur sehingga secara perlahan-lahan lumpur tersebut mampu

menenggelamkan rumah penduduk dan infrastruktur lainnya seperti, fasilitas umum, sekolah, masjid, kantor desa, kantor kecamatan, ratusan hektar persawahan, perkebunan, pekarangan, puluhan pabrik, beberapa ratus desa, dan puluhan kecamatan yang tepatnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Walaupun telah diusahakan berbagai upaya, berbagai ahli, berbagai ikhtiar telah dilakukan, lumpurpun tetap menyembul keluar, meluas, dan mengalir terus menenggelamkan seluruh wilayah di sekitarnya tanpa pandang bulu, pelan tetapi pasti terus mengalir.

Menurut Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang dibentuk oleh Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007 menyatakan bahwa untuk mengalirkan lumpur ke sungai Porong disediakan 16 unit pompa berkekuatan 2.700 *horse power* (hp) berkapasitas 4,3 meter kubik per detik. Sementara beroperasi 9 unit berkekuatan 1.500 hp dengan kapasitas 2,15 meter kubik per detik. Artinya, dalam sehari 18 jam ada 139.320 meter kubik lumpur dibuang (Solusi, 2008). Lumpur Lapindo ini banyak mengakibatkan dampak ke berbagai sektor perekonomian di Sidoarjo, terutama sektor pertanian dan industri. Beberapa pabrikpun mampu ditenggelamkan dan bertambah masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya, mulai petani sampai buruh pabrik. Mereka menganggur karena tidak memiliki keterampilan dan kemampuan bersaing. Ada juga yang berpindah ke daerah lain untuk mencari pekerjaan lain. Pergeseran profesi dan pekerjaan telah terjadi di semua sektor. Ada yang dulu bekerja di pabrik, sekarang menjadi pedagang. Ada juga yang asalnya buruh tani menjadi karyawan. Atau dulu ada yang bekerja di sektor pertanian bergeser ke sektor industri, atau sebaliknya. Bagi warga Sidoarjo, peristiwa ini sangat merugikan kondisi perekonomian di wilayahnya.

Peristiwa ini tidak saja menjadi peristiwa lokal, akan tetapi telah menjadi isu nasional. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan DPRpun ikut memikirkan bagaimana memediasi aspirasi masyarakat dengan PT. Lapindo Brantas serta mencari solusi terbaik bagi masyarakat Sidoarjo ke depan, dari ganti rugi rumah, pekarangan, sampai dengan tanah. Beberapa upaya telah dilakukan antara lain sampai 14 Februari 2008, total luas sawah, pekarangan, dan bangunan yang sudah di Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) adalah seluas 4.396.266,469 meter persegi atau 439,627 hektar are. Area

ini setara dengan 48.847 unit rumah tipe 36 dengan luas tanah 90 meter persegi (Solusi, 2008). Dalam peristiwa lumpur Sidoarjo yang menjadi persoalan bukan hanya fisik semata, tetapi juga psikis. Kehilangan mata pencaharian dan pekerjaan adalah problema fisik yang sekaligus juga memiliki dampak psikis. Menyediakan lapangan pekerjaan dan memperluas kesempatan kerja adalah tanggungjawab pemerintah.

Menurut Mangkoesebroto (2001:2), pemerintah dalam perekonomian modern memiliki 3 peran, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Untuk kasus lumpur Lapindo, pemerintahlah yang harus aktif menjalankan ketiga peran tersebut, di samping masyarakat Kabupaten Sidoarjo sendiri. Berdasarkan pendahuluan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian, yaitu bagaimana gambaran pergeseran atau peta perpindahan jenis pekerjaan/profesi dari sektor satu ke sektor yang lain masyarakat Sidoarjo yang terkena lumpur Lapindo ini. Manfaat kajian ini adalah memberi gambaran tentang pergeseran/perpindahan jenis pekerjaan dari satu sektor ke sektor lain dan rekomendasi bagi semua pihak para pengambil keputusan terutama yang berkaitan dengan penyediaan lapangan pekerjaan sebagai upaya penanggulangan para korban lumpur Lapindo.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Tenaga kerja (*manpower/labour*) adalah salah satu faktor dari tiga faktor produksi yang dapat mempengaruhi tingkat produksi selain *land*, *capital*, dan *managerial skill*. Secara agregat, tenaga kerja yang berkualitas akan meningkatkan tingkat produksi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Berarti peran tenaga kerja sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Namun pertumbuhan ekonomi harus dibedakan dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu aspek dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang, sedangkan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi ditambah perubahan (Sukirno, 2007:10). Hal ini memiliki arti bahwa pembangunan ekonomi dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu tidak saja diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa saja dari tahun ke tahun, tetapi juga diukur dari perubahan lain yang berlaku dalam berbagai aspek

kegiatan ekonomi, seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dalam kesehatan, peningkatan dalam infrastruktur yang tersedia, dan peningkatan pendapatan dan kemakmuran masyarakat. Abipraja (1993: 1) mendefinisikan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang mengakibatkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang.

Telah menjadi kesepkatan bersama termasuk sejumlah ekonom, bahkan sering menjadi jargon para politisi bahwa ada tiga hal yang menjadi kajian penting dari keberhasilan pembangunan ekonomi di samping peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu perkembangan perluasan kesempatan kerja, perkembangan pemerataan, dan jumlah penduduk miskin yang semakin berkurang. Untuk menjawab ketiga hal tersebut dibutuhkan beberapa indikator yang dapat diukur secara kuantitatif.

Jumlah penduduk yang besar tidak otomatis menjadi modal pembangunan, bahkan dapat menjadi beban pembangunan. Ada dua problema tenaga kerja di negara-negara berkembang, yaitu kekurangan keterampilan kritis yang dibutuhkan sektor industri dan mempunyai tenaga kerja surplus (Jhingan, 2007:415). Peningkatan potensi sumber daya manusia, pendidikan, keahlian/keterampilan tenaga kerja bagi berhasilnya pembangunan itu penting. Tidaklah cukup jumlah penduduk secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitas. Pembentukan modal manusia adalah proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan, dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan politik suatu negara. Pembentukan modal manusia berkaitan dengan investasi pada manusia dan pengembangannya sebagai sumber yang kreatif dan produktif (Jhingan, 2007: 414). Penduduk merupakan tenaga kerja yang dapat meningkatkan volume produksi dan kapasitas produksi suatu negara atau daerah. Apabila produktivitas meningkat, PDB juga meningkat. Akselerasi liniernya adalah jika tingkat pendapatan penduduk meningkat, maka dengan sendirinya tingkat gizi, kesehatan juga meningkat, begitu pula dengan tingkat pendidikan. Pada akhirnya, tingkat kesejahteraan masyarakat akan tercapai sebagaimana yang diinginkan bersama. Untuk mencapai hal itu tidak mudah karena perlu kerja keras dan cerdas dari semua *stakeholder*. Menurut Widodo (1990:104), pempupukan

modal investasi, laju pertumbuhan ekonomi, volume ekspor, dan PDB menjadi kurang berarti jika tidak mengikutsertakan peran serta penduduk dalam pembangunan ekonomi.

Ada beberapa pendekatan, teori, dan permodelan dalam pembahasan kependudukan kaitannya dengan produktivitas dan ketenagakerjaan, seperti membandingkan orang yang bekerja dengan yang menganggur yang disebut pendekatan *labour force approach* (angkatan kerja) dan untuk melihat lebih teliti di antara penduduk yang bekerja penuh atau setengah menganggur yang disebut *labor utilization approach*. Pendekatan kedua ini lebih menggambarkan keadaan realistik tentang produktivitas penduduk. Berdasarkan konsep *labor utilization approach* ini akan diperoleh gambaran lebih mendalam tentang keadaan ketenagakerjaan, sehingga analisis tentang potensi dan kemampuan penduduk lebih realistik. Smith dalam Deliarnov, (1995:36) mengatakan bahwa cukup banyak memberikan perhatian pada produktivitas tenaga kerja. Berdasarkan hasil pengamatannya yang cukup mendalam, Smith menyimpulkan bahwa produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui pembagian kerja. Pembagian ini akan mendorong spesialisasi, bahkan orang akan memilih pekerjaan yang terbaik sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing.

Ada beberapa istilah dalam ketenagakerjaan, misalnya usia kerja, tenaga kerja, angkatan kerja, penganggur (*unemployment*). Usia kerja adalah posisi usia yang seharusnya orang tersebut bekerja dan memiliki pekerjaan. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut usia kerja di Indonesia, 10 tahun ke atas. Sejak tahun 1998 dinaikkan menjadi 15 tahun ke atas. Batasan umur tiap negara berbeda. Semakin maju perekonomiannya, batas umur usia kerja minimum semakin tinggi (Mantra, 2004:224). Dalam Dumairy (1996:75), Soeroto (1986:10), Simanjuntak (1985:10), Sukirno (200:472), BPS (2007:30) menyatakan bahwa tenaga kerja adalah penduduk usia kerja yang sudah bekerja atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan, dan sedang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Penganggur adalah angkatan kerja yang telah memasuki usia kerja, tetapi belum terserap di dunia pekerjaan, atau masih mencari pekerjaan. Sedangkan pelajar, ibu rumah tangga, para pensiun dan penderita cacat itu bukan angkatan kerja.

Keberhasilan pembangunan ekonomi erat kaitannya dengan partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah persentase angkatan kerja terhadap tenaga kerja. Untuk mengetahui tingkat partisipasi angkatan kerja dalam suatu daerah dapat dihitung dengan model berikut ini:

$$TPAK = \frac{\sum AK}{\sum TK} \times 100\%$$

TPAK adalah tingkat partisipasi angkatan kerja
AK adalah angkatan kerja
TK adalah tenaga kerja.

Angka pengangguran di suatu daerah dihitung menggunakan rasio persentase (%) jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Sukirno (2000:472) mendefinisikan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Penyebab pengangguran dibedakan ke dalam tiga jenis pengangguran, yaitu friksional, struktural, dan konjungtur. Pengangguran friksional disebabkan oleh tindakan meninggalkan kerja dan mencari pekerjaan lain yang lebih baik sesuai keinginannya. Pengangguran struktural ini disebabkan oleh adanya kemajuan teknologi, persaingan dan perkembangan ekonomi pesat di tempat lain. Sedangkan pengangguran konjungtur disebabkan karena siklus usaha yang naik turun (*business cycle*) dan pengurangan permintaan agregat dengan kesempatan kerja. Formula untuk menghitung angka tingkat pengangguran sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\sum \text{penganggur}}{\sum \text{angkatan kerja}} \times 100\%$$

Angka hasil formula tersebut sangat bermanfaat untuk mengamati kondisi angkatan kerja pada pasar tenaga kerja saat itu. Pemahaman terhadap pasar tenaga kerja, sangat penting untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan tentang ketenagakerjaan, perluasan lapangan

pekerjaan, dan kebijakan kependudukan di suatu negara atau daerah.

Kajian ini membahas tentang pergeseran atau perpindahan tenaga kerja pasca lumpur Lapindo di Sidoarjo dengan menguraikan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja lebih dahulu agar mampu menjelaskan kajian tersebut. Kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang tertampung untuk bekerja pada suatu perusahaan atau institusi. Kesempatan kerja ini akan dapat menampung semua tenaga kerja yang tersedia dan seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia. Dengan ketentuan lapangan kerja (usaha) yang tersedia tersebut mencukupi dan seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang ada. Lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan dari suatu usaha atau perusahaan/instansi (BPS, 2007:153). Lapangan pekerjaan/usaha utama dibagi ke dalam tiga kelompok sektor, yaitu sektor primer, sekunder, dan tersier. Secara rinci, sektor lapangan pekerjaan/usaha yang dihitung dalam PDB adalah sembilan sektor, yaitu 1) Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan; 2) Pertambangan dan Pengalihan; 3) Industri Pengolahan; (4) Listrik, Gas, dan Air Bersih; 5) Bangunan (Konstruksi); 6) Perdagangan, Hotel, dan Restoran; 7) Pengangkutan dan Komunikasi; (8) Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan; dan (9) Jasa-jasa.

Angka penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor usaha sangat penting untuk perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Pemerataan kesempatan kerja juga harus menjadi prioritas dalam pembangunan. Pendapatan tenaga kerja meningkat. Jika ini yang terjadi maka produktivitas tenaga kerja juga akan menjadi meningkat. Dalam neraca ketenagakerjaan biasanya dilihat antara jumlah angkatan kerja (AK) dan jumlah kesempatan kerja (KK) yang tersedia. Jika angkatan kerja lebih besar dari kesempatan kerja maka terjadi pengangguran atau laju pertumbuhan angkatan kerja lebih besar daripada laju pertumbuhan kesempatan kerja mengakibatkan laju pertumbuhan pengangguran juga bertambah, dan sebaliknya. Dalam perspektif makroekonomi laju pertumbuhan kesempatan kerja dapat dikaitkan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, laju pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi laju pertumbuhan kesempatan kerja. Hubungan antara laju pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan

kesempatan kerja ini dapat dijelaskan melalui elastisitas kesempatan kerja. Elastisitas kesempatan kerja yang semakin tinggi menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. Indikator elastisitas ini sering digunakan pemerintah dalam memilih suatu kebijakan yang menggerakkan sektor ekonomi dengan program padat modal atau padat karya. Adapun formula untuk menghitung elastisitas kesempatan kerja adalah:

$$E_{kk} = \frac{\Delta KK}{\Delta PDB} \times 100\%$$

- E_{kk} adalah elastisitas kesempatan kerja
 ΔKK adalah laju pertumbuhan kesempatan kerja
 ΔPDB adalah laju pertumbuhan ekonomi (*rate of growth*)

Angka elastisitas kesempatan kerja yang semakin tinggi pada suatu daerah/negara, memberi indikasi bahwa daerah/negara tersebut memiliki kemampuan dalam menciptakan kesempatan kerja yang semakin tinggi dan sebaliknya.

Salah satu indikator penting tentang kualitas angkatan kerja adalah tingkat pendidikan formal yang mereka capai. Widodo (1990:115) mengklasifikasikan sebagai berikut 1) Tidak sekolah; 2) Tidak tamat SD; 3) Tamat SD; 4) Tidak tamat SMP; 5) Tamat SMP; 6) Tidak tamat SMA; 8) Tidak tamat PT; dan 9) Tamat PT. Jenjang pendidikan dapat dikaitkan dengan indikator tingkat pendapatan baik di pedesaan maupun perkotaan, tingkat kemiskinan, tingkat produktivitas, dan lapangan usaha yang dimasuki. *Prototype* hubungan jenjang pendidikan dan lapangan usaha ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 1
Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Lapangan Usaha

| Tingkat Pendidikan | Lapangan Usaha |
|---------------------------|----------------|
| Tamat Sekolah Dasar | Sektor A |
| Tamat SMA | Sektor M |
| Tamat Akademi/Universitas | Sektor S |

Sumber: Widodo (1990:116).

Catatan:

- Sektor A : Pertanian
 Sektor M : Pertambangan dan Penggalian, Industri, dan Bangunan
 Sektor S : Listrik, Gas dan Air Minum, Keuangan, Perdagangan, Transportasi, Jasa-jasa, lain-lain.

Secara umum, penggambaran jenjang pendidikan dan lapangan usaha dapat diuraikan secara luas dengan melihat jumlah pekerja (*absolute/relative*) menurut jenjang pendidikan 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) dan lapangan usaha di masing-masing sektor ekonomi. Kasus pergeseran atau perpindahan tempat kerja tenaga kerja pasca lumpur Lapindo di Sidoarjo ini berbeda dengan kasus perpindahan tenaga kerja pada umumnya yang biasanya disebabkan oleh berbagai faktor, seperti upah yang rendah, lingkungan kerja yang tidak kondusif, kedekatan pabrik dengan domisili, mencari pekerjaan yang lebih baik, tidak sesuai keterampilan yang dimiliki. Untuk kasus lumpur Lapindo, penyebab pergeseran atau perpindahan tenaga kerja atau jenis pekerjaan adalah pabrik, perusahaan, atau rumahnya yang sudah ditenggelamkan oleh lumpur Lapindo sehingga tidak memungkinkan tenaga kerja tersebut tetap tinggal di wilayah tersebut. Dengan sangat terpaksa mereka harus meninggalkan tempat tinggal sekaligus tempat bekerjanya dan harus pindah ke tempat lain serta harus mencari pekerjaan atau profesi lain atau mata pencaharian yang lain. Oleh karena itu, studi ini mengkaji bagaimana pergeseran/perpindahan tenaga kerja/profesi pasca lumpur Lapindo di Sidoarjo.

Manning dalam Kuncoro (2006: 208) membahas segmentasi pasar tenaga kerja dalam teori dualisme sosial Boeke. Boeke menekankan adanya perbedaan yang kontras dalam metode organisasi tenaga kerja dan sistem upah di timur dan barat. Boeke mengkritik teori neo-klasik tentang aspek penting untuk memahami pasar tenaga kerja di negara sedang berkembang. Manning (1980) memberi catatan dari hasil studinya yang dilakukan terhadap 83 perusahaan manufaktur pada 3 industri di Indonesia, yaitu industri tenun, rokok kretek, dan rokok. Tiga industri ini dipilih karena memiliki ukuran perusahaan dan teknologi yang beragam.

Berdasarkan segi kepemilikan, ketiga industri ini dimiliki oleh perusahaan domestik dan asing.

Berdasarkan hasil studinya menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja di ketiga industri ini terbukti mengandung segmentasi yang tinggi. Bentuk segmentasinya adalah perusahaan asing memiliki upah tingkat upah tertinggi, mobilitas antarperusahaan yang rendah, dan mobilitas dengan segmen pasar lain yang rendah. Perusahaan-perusahaan ini termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Koperasi merekrut tenaga kerja laki-laki dengan pendidikan SLTP tanpa pengalaman sebelumnya. Mobilitas antarperusahaan paling tinggi dijumpai antarperusahaan yang tidak menggunakan mesin yang menarik tenaga kerja perempuan dari daerah pedesaan dan telah berpengalaman sebelumnya. Manning juga menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja terbagi dalam beberapa segmen dan tidak hanya ada dua segmen saja sebagaimana yang dikemukakan Boeke. Segmentasi tenaga kerja ini merupakan hal yang wajar dan banyak diakibatkan karena teknologi baru. Juga diperkuat oleh regulasi pemerintah terhadap sektor modern dalam perekonomian. Pergeseran tenaga kerja akibat lumpur Lapindo berbeda dengan Boeke dan Manning yang murni karena peristiwa alam yang di luar perkiraan manusia, regulasi, dan teknologi.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis data pergeseran tenaga kerja pasca lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo. Data sekunder berupa dokumen angka-angka perubahan tenaga kerja yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sidoarjo. Data yang diolah selama periode 5 (lima) tahun secara runtut waktu (*time series*) dari tahun 2003-2007. Di samping itu, ada penelusuran buku kepustakaan dan *literature* lain untuk mempertajam analisis. Pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan data tersebut menggunakan analisis deskriptif dengan studi kasus tenaga kerja yang ada di wilayah tersebut.

HASIL PENELITIAN

Kesempatan kerja merupakan aspek penting dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dengan memiliki pekerjaan, seseorang akan mendapat penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Ketidaksiharian antara jumlah penduduk usia kerja dengan tersedianya lapangan pekerjaan/kesempatan kerja akan menimbulkan masalah pengangguran. Beberapa aspek ketenagakerjaan yang penting di

antaranya komposisi angkatan kerja, penyerapan tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, status pekerjaan, dan jumlah jam kerja. Jenis pekerjaan harus sesuai dengan tingkat pendidikan dan jenis keterampilan yang dimiliki angkatan kerja.

Secara empiris akan dianalisis pergeseran tenaga kerja pasca lumpur Lapindo di Sidoarjo berdasarkan data komposisi penduduk Kabupaten Sidoarjo menurut jenis pekerjaan/mata pencaharian per kecamatan tahun 2006 dan komposisi penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha dan jenis kelamin. Berdasarkan jenis pekerjaan pada Tabel 1, menunjukkan bahwa penduduk paling banyak bekerja di bidang swasta (313.658 orang), bidang berwiraswasta/pedagang sebanyak 90.273 orang, berprofesi sebagai buruh tani sebanyak 75.401 orang, dan berprofesi sebagai petani sebanyak 72.163 orang. Jika dilihat per wilayah kecamatan dari seluruh jenis pekerjaan menunjukkan bahwa Kecamatan Candi tertinggi jumlah penduduknya, yaitu 8.193 orang, Kecamatan Waru 74.386 orang, Kecamatan Krian 62.703 orang, dan Kecamatan Taman 58.884 orang. Jika dilihat per kecamatan, di empat kecamatan itu banyak berdiri pabrik-pabrik yang menyerap tenaga kerja. Tetapi jika dilihat dari jenis pekerjaannya menunjukkan bahwa penduduk Sidoarjo banyak yang bekerja di sektor swasta, perdagangan, wiraswasta, dan sebagian lagi bekerja sebagai petani dan buruh tani. Apabila komposisi petani pemilik berubah menjadi buruh tani dan buruh pabrik, maka menunjukkan bahwa banyak petani pemilik tanah di Sidoarjo terdorong untuk menjual tanah sawahnya untuk dijadikan lahan pabrik-pabrik perusahaan swasta karena hasil produksi pertanian yang selalu kurang menguntungkan dari tahun ke tahun. Apabila dihubungkan dengan lumpur Lapindo menjadi tambah parah sehingga ada pergeseran ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa komposisi penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha dan jenis kelamin di Kabupaten Sidoarjo tahun 2006, jika dilihat dari lapangan usaha yang paling tinggi menyerap tenaga kerja adalah bidang industri dan perdagangan yang mencapai 217.742 orang dan 104.679 orang, paling sedikit menyerap tenaga kerja adalah bidang pertambangan dan galian dan listrik, gas dan air bersih yang hanya 2 ribuan saja. Jika dilihat dari jenis kelamin

Tabel 1
Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan/Mata Pencarian
Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2006

| Kecamatan | PNS | TNI | POL-RI | Swasta | Jenis Pekerjaan/Mata Pencarian | | | | | | | | | |
|----------------|-------|--------|--------|---------|--------------------------------|--------|-------------|------------|-----------|---------|----------|--------|---------|--|
| | | | | | Wirasw Pedagang | Pelani | Pertukangan | Buruh Tani | Penjualan | Nelayan | Pemukang | Jasa | Jumlah | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | |
| 1.Sidoarjo | 5.975 | 438 | 80 | 22.120 | 889 | 4.900 | 3.455 | 4.630 | 1.815 | 203 | 70 | 422 | 44.691 | |
| 2.Buduran | 1.480 | 737 | 124 | 13.484 | 1.726 | 1.668 | 519 | 2.776 | 260 | 92 | 3 | 293 | 23.174 | |
| 3.Candi | 3.089 | 2.273 | 879 | 36.941 | 19.952 | 8.193 | 6.882 | 7.439 | 1.057 | 495 | 30 | 236 | 87.966 | |
| 4.Ponong | 1.136 | 796 | 297 | 7.544 | 2.737 | 2.252 | 2.235 | 3.609 | 311 | 25 | 0 | 1.342 | 22.244 | |
| 5.Kerubung | 1.391 | 155 | 81 | 5.345 | 1.905 | 4.160 | 1.069 | 1.506 | 350 | 2 | 20 | 974 | 16.958 | |
| 6.Tulangen | 1.360 | 231 | 181 | 7.435 | 6.421 | 9.143 | 781 | 8.900 | 661 | 0 | 30 | 543 | 35.895 | |
| 7.Tanggulangin | 1.425 | 730 | 280 | 19.458 | 5.990 | 3.750 | 1.459 | 6.000 | 610 | 45 | 25 | 1.300 | 41.032 | |
| 8.Jalton | 440 | 213 | 29 | 9.338 | 1.671 | 975 | 477 | 936 | 465 | 234 | 110 | 1.216 | 16.052 | |
| 9.Krian | 2.048 | 941 | 89 | 28.351 | 13.457 | 5.103 | 2.014 | 5.103 | 1.258 | 0 | 0 | 1.339 | 62.703 | |
| 10.Balohendo | 690 | 294 | 77 | 9.907 | 1.610 | 3.618 | 780 | 2.805 | 326 | 0 | 21 | 200 | 20.136 | |
| 11.Wonorejo | 905 | 160 | 26 | 7.556 | 2.986 | 4.006 | 991 | 3.084 | 339 | 0 | 0 | 490 | 20.443 | |
| 12.Tarik | 676 | 192 | 44 | 9.589 | 2.329 | 3.618 | 775 | 6.965 | 371 | 2 | 37 | 177 | 24.775 | |
| 13.Prambon | 740 | 246 | 45 | 5.541 | 3.482 | 12.336 | 1.364 | 9.427 | 300 | 0 | 0 | 1.344 | 34.825 | |
| 14.Taman | 4.923 | 2.424 | 1.287 | 32.079 | 7.113 | 2.988 | 2.054 | 1.599 | 3.509 | 20 | 78 | 1.210 | 58.884 | |
| 15.Maru | 7.560 | 1.647 | 826 | 47.316 | 11.400 | 574 | 1.493 | 422 | 2.165 | 28 | 865 | 85 | 74.386 | |
| 16.Oedangan | 1.588 | 1.472 | 82 | 30.155 | 4.909 | 1.857 | 634 | 1.736 | 1.521 | 0 | 0 | 36 | 43.970 | |
| 17.Sedaf | 1.972 | 3.104 | 4 | 13.879 | 1.866 | 1.375 | 744 | 3.511 | 465 | 691 | 13 | 84 | 27.668 | |
| 18.Sukodono | 1.560 | 327 | 264 | 7.628 | 50 | 2.301 | 210 | 5.152 | 163 | 0 | 0 | 25 | 17.710 | |
| Total | 38.92 | 16.380 | 4.695 | 313.658 | 90.273 | 72.163 | 27.936 | 75.401 | 15.947 | 1.812 | 1.322 | 14.818 | 673.313 | |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Sidoarjo, Data diolah (2007).

yang paling banyak jenis kelamin laki-laki mencapai 545.623 orang, sedangkan perempuan hanya 251.483 orang saja. Hal ini membuktikan bahwa lapangan usaha banyak di dominasi perempuan. Jika dilihat dari persentase penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sidoarjo, urutannya adalah bidang industri 40,34%, perdagangan 22,52%, dan bidang jasa-jasa 13,39%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah kabupaten/kota yang maju dan berkembang pesat.

Berdasarkan Tabel 3, nampak jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas berdasarkan jumlah orang yang terserap perusahaan-perusahaan di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2003-2007, tertinggi pada tahun 2005 mencapai 917.138 orang dan tahun 2007 mencapai 910.851 orang, sedangkan paling rendah penyerapan tenaga kerja terjadi pada tahun 2003 yang hanya mencapai 799.440 orang saja. Jika dilihat dari rasio penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sidoarjo terhadap Propinsi Jawa Timur, kontribusinya sangat kecil yaitu rata-rata hanya 4,4% selama 5 tahun.

Tabel 2
Komposisi Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2006

| Lapangan Usaha | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Persentase |
|--------------------------------|-----------|-----------|---------|------------|
| 1. Pertanian | 36.021 | 19.303 | 55.324 | 6,94 |
| 2. Pertambangan dan galian | 2.696 | 0 | 2.696 | 0,34 |
| 3. Industri | 217.742 | 103.816 | 321.558 | 40,34 |
| 4. Listrik, Gas dan Air | 2.854 | 0 | 2.854 | 0,36 |
| 5. Konstruksi | 58.399 | 1.565 | 59.964 | 7,52 |
| 6. Perdagangan | 104.679 | 74.869 | 179.548 | 22,52 |
| 7. Transportasi dan Komunikasi | 47.683 | 3.479 | 51.162 | 6,42 |
| 8. Keuangan | 11.713 | 5.023 | 16.736 | 2,10 |
| 9. Jasa-jasa | 63.367 | 43.369 | 106.736 | 13,39 |
| 10. Lainnya | 469 | 59 | 528 | 0,07 |
| Total | 545.623 | 251.483 | 797.106 | 100,00 |

Sumber: BPS Kab.Sidoarjo. Data diolah (Susenas).

Tabel 3
Jumlah Angkatan Kerja Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja di Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2003-2007

| Tahun | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Sidoarjo | 799.440 | 822.801 | 917.138 | 861.788 | 910.851 |
| Jawa Timur | 18.097.118 | 18.822.218 | 19.335.890 | 19.244.959 | 20.117.924 |
| Rasio (%) | 4,42 | 4,37 | 4,74 | 4,48 | 4,53 |

Sumber: BPS 2007. Data diolah (Sakernas dan Susenas).

Tabel 4
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dalam % di Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2003-2007

| Tahun | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Sidoarjo | 62,93 | 64,55 | 67,28 | 63,20 | 66,97 |
| Jawa Timur | 66,64 | 69,20 | 69,17 | 70,41 | 68,99 |
| Rasio (%) | 94,43 | 93,28 | 97,26 | 89,75 | 97,07 |

Sumber: BPS 2007. Data diolah (Sakernas dan Susenas).

Berdasarkan Tabel 4, nampak jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Sidoarjo selama kurun waktu tahun 2003-2007 jika dilihat dari persentase orang yang terserap perusahaan-perusahaan di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2003-2007 tertinggi pada tahun 2005 mencapai 67,28%, sedangkan paling rendah pada tahun 2003 yang hanya mencapai 62,93%. Jika dilihat dari rasio tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Sidoarjo terhadap Propinsi Jawa Timur, memiliki kontribusi sangat besar yaitu rata-rata di atas 90% selama 5 tahun.

Berdasarkan Tabel 5 nampak jumlah penganggur di Kabupaten Sidoarjo tahun 2003-2007, tertinggi pada tahun 2007 mencapai 115.408 orang, sedangkan paling rendah pada tahun 2004 mencapai 73.878 orang. Jika dilihat dari rasio jumlah penganggur di Kabupaten Sidoarjo terhadap jumlah penganggur secara keseluruhan di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo memiliki kontribusi tertinggi pada tahun 2007 mencapai 8,44%, tahun 2006 dan sebelumnya rata-rata 5-6%.

Berdasarkan Tabel 6 nampak angka pengangguran terbuka di Kabupaten Sidoarjo tahun 2003-2007, tertinggi pada tahun 2005 dan 2007 mencapai 12,67% dan 12,35%, sedangkan paling rendah pada tahun 2004 mencapai 8,98%. Jika dilihat dari rasio angka

pengangguran terbuka di Kabupaten Sidoarjo terhadap angka pengangguran terbuka keseluruhan daerah di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo memiliki kontribusi tertinggi pada tahun 2007 mencapai 186,60% dan terendah 114,77% tahun 2006, tetapi rata-rata kontribusinya di atas 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo sangat tinggi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator tingkat kesejahteraan suatu masyarakat di suatu negara menurut *United National Development Program* (UNDP) yang terdiri dari aspek pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita. Berikut ini disajikan data perkembangan aspek kemampuan daya beli di Kabupaten Sidoarjo:

Berdasarkan Tabel 7 nampak komponen IPM Kabupaten Sidoarjo tahun 2003-2007 berdasarkan aspek kemampuan daya beli masyarakat, tertinggi pada tahun 2007 mencapai 70,05% dan pada tahun 2003-2006 rata-rata mencapai 56%. Jika dilihat dari rasio dari kemampuan daya beli masyarakat di Kabupaten Sidoarjo terhadap kemampuan daya beli masyarakat keseluruhan di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo memiliki kontribusi tertinggi pada tahun 2007, yaitu 111,83% dan terendah 101,74% pada tahun 2005, tetapi rata-rata kontribusinya pada Provinsi Jawa Timur

Tabel 5
Jumlah Angka Pengangguran di Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2003-2007

| Tahun | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sidoarjo | 83.652 | 73.878 | 113.223 | 81.002 | 115.408 |
| Jawa Timur | 1.571.420 | 1.447.263 | 1.646.058 | 1.575.299 | 1.366.503 |
| Rasio (%) | 5,32 | 5,10 | 6,88 | 5,14 | 8,44 |

Sumber: BPS 2007. Data diolah (Sakernas dan Susenas).

Tabel 6
Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2003-2007

| Tahun | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sidoarjo | 10,46 | 8,98 | 12,35 | 9,40 | 12,67 |
| Jawa Timur | 8,68 | 7,69 | 8,51 | 8,19 | 6,79 |
| Rasio (%) | 120,51 | 116,77 | 145,12 | 114,77 | 186,60 |

Sumber: BPS 2007. Data diolah (Sakernas dan Susenas).

Tabel 7
Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003-2007
Aspek Kemampuan Daya Beli Masyarakat (*Purchasing Power Parity*)

| Tahun | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sidoarjo | 56,09 | 56,93 | 57,78 | 56,92 | 70,05 |
| Jawa Timur | 51,29 | 52,21 | 56,79 | 55,71 | 62,64 |
| Rasio | 109,36 | 109,04 | 101,74 | 102,17 | 111,83 |

Sumber: BPS 2007. Data diolah.

mencapai di atas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Sidoarjo di atas kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Timur.

PEMBAHASAN

Secara empiris hasil analisis tersebut telah memberikan gambaran secara umum, bahwa keadaan tenaga kerja di Kabupaten Sidoarjo mengalami pergeseran dari satu sektor ke sektor lain, baik menurut jumlah orang maupun persentasenya. Mencari penghasilan yang lebih baik, lebih tinggi bagi setiap orang itu sudah menjadi harapan semua orang untuk membiayai kehidupannya, tidak terkecuali masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang terkena lumpur Lapindo. Terpaksa atau tidak, perpindahan dari satu tempat kerja ke tempat kerja lain itu sudah biasa. Pergeseran profesi satu ke profesi lain, tidak menjadi masalah selama orang yang bersangkutan merasa puas atas keahliannya, asetnya tidak berkurang, dan sementara penghasilannya dianggap cukup. Begitu pula jika bekerja pada perusahaan, diharapkan yang memiliki perusahaan juga merasa puas terhadap hasil kerja para pekerjanya, walaupun dilihat dari nilai produktivitas belum optimal.

Pemerintah dengan regulasinya memiliki peran yang penting dalam menjembatani antara kepentingan para buruh (karyawan) dengan kepentingan pengusaha yang berorientasi pada keuntungan. Peningkatan upah buruh (minimal sama dengan upah minimum regional/provinsi atau UMR) yang tercapai akan menciptakan ketenangan bekerja sehingga akhirnya akan meningkatkan nilai produktivitas. Harapan pengusaha akan tercapai dengan profit lebih besar dan perusahaan bisa ekspansi. Dalam persektif ideal makroekonomi, jika tabungan dan investasi masyarakat meningkat, banyak pabrik berdiri, lapangan pekerjaan meluas, dan tenaga

kerja terserap di dunia kerja, maka nilai produksi barang dan jasa (PDB) juga akan meningkat secara nasional. Jika fakta ini yang terjadi, maka devisa negara akan meningkat, pertumbuhan ekonomi menjadi lebih optimal, dan kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Pada ruang lingkup lokal masyarakat Kabupaten Sidoarjo pasca lumpur Lapindo dengan adanya pergeseran/perpindahan tenaga kerja ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraannya. Minimal dengan pindahnya bekerja (tempat/profesi) tersebut dapat mengembalikan harta/aset yang telah dimiliki sebelum lumpur Lapindo terjadi bahkan mungkin meningkat.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Pergeseran ketenagakerjaan akibat lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo dari satu jenis pekerjaan ke pekerjaan lain, dari sektor primer ke sektor sekunder maupun tersier atau sebaliknya, tidak menjadi masalah sepanjang tidak meresahkan masyarakat dan adanya ketersediaan lapangan pekerjaan dan kesempatan yang luas bagi penduduk yang masuk pada usia bekerja. Namun kadang antara pendapatan yang diperoleh dengan biaya hidup sehari-hari per bulan kurang mencukupi. Pemerintah daerah maupun pusat telah berupaya untuk membantu menjembatani kepentingan para buruh/tenaga kerja dengan para pengusaha dengan menetapkan upah minimum regional (UMR) atau upah minimum wilayah.

Jumlah penduduk yang banyak di Kabupaten Sidoarjo belum dapat menjadi modal utama dalam pembangunan ekonomi daerah, jika kualitas sumber daya manusianya rendah. Sumber daya manusia

merupakan salah satu faktor produksi yang dapat meningkatkan volume produksi, kapasitas produksi. Tenaga kerja dinilai produktif jika setiap penambahan seorang tenaga kerja akan meningkatkan unit produksi. Produktivitas akan selalu diukur dengan jumlah unit produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam setiap jam, hari, minggu, bulan, bahkan tahunan.

Rekomendasi

Untuk mengurangi tingkat pengangguran besar-besaran yang diakibatkan lumpur Lapindo, pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus mengupayakan beberapa hal seperti a). menyediakan lapangan pekerjaan di sektor riil berbasis padat karya yang sesuai dengan *skill* yang mereka miliki; b) memobilisasi tenaga kerja dan memberi pelatihan secara bertahap, berlanjut, dan terprogram ke arah peningkatan pendapatan dan kemampuan daya beli masyarakat; c) memberikan kredit produktif dengan bunga rendah dan periode pembayaran yang relatif panjang; dan d) pengembangan sektor perikanan dan kelautan yang berpotensi ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2007. *Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka*
- _____. 2007. *Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Timur*.
- _____. 2007. *Propinsi Jawa Timur Dalam Angka: Keadaan Angkatan Kerja*
- Deliamov. 1995. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta, Rajawali Grafindo.
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Jhingan, M.L.. 2007. *The Economics of Development and Planning*, Terjemahan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Edisi Keempat, Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Lembaga Kajian La Cassa (LC). *Tahukah Anda*, Jurnal Solusi: Jembatan Untuk Semua, Edisi 14 Tanggal 26 Februari-3 Maret 2008.
- _____. *Tahukah Anda*, Jurnal Solusi ; Jembatan Untuk Semua, Edisi 17 Tanggal 18-24 Maret 2008.
- Mantra, Ida Bagus. 2004. *Demografi Umum*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Mangkoesobroto. 2001. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta, BPFE-UGM.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Soeroto. 1986. *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja*. Yogyakarta, Penerbit Gajah Mada University Press.
- Simanjuntak, A.J. Payaman. 1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta, LPFE-Universitas Indonesia.
- Widodo, HG.Suseno Triyanto. 1990. *Indikator Ekonomi: Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta, Kanisius.